

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

BPTP Kalimantan Timur
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



Jalan PM Noor - Sempaja Samarinda

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Kalimantan Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Kalimantan Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Samarinda, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Muhammad Amin, S.Pi., M.Si
NIP. 197102061999031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

- D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1. Koreksi Lain-lain
 - E.4.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.3. Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5. Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.6. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Kalimantan Timur yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Muhammad Amin, S.Pi., M.Si
NIP. 197102061999031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Kalimantan Timur Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp352.076.078,00 atau mencapai 268,04% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp131.350.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp12.281.589.318,00 atau mencapai 96,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.731.626.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp61.252.102.001,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.052.650.974,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp59.197.922.277,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.528.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17.541.052,00 dan Rp61.234.560.949,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp222.764.968,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.159.942.149,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-11.937.177.181,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp214.829.610,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-11.722.347.571,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp24.934.370.860,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-11.722.347.571,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp36.012.377.971,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.010.159.689,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp61.234.560.949,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	131.350.000,00	352.076.078,00	268,04	250.492.138,00
Jumlah Pendapatan		131.350.000,00	352.076.078,00	268,04	250.492.138,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.515.000.000,00	4.290.192.020,00	95,02	4.118.614.589,00
Belanja Barang	B.4.	7.323.938.000,00	7.116.008.298,00	97,16	6.379.712.040,00
Belanja Modal	B.5.	892.688.000,00	875.389.000,00	98,06	5.750.710.809,00
Jumlah Belanja		12.731.626.000,00	12.281.589.318,00	96,47	16.249.037.438,00

II. NERACA

BPTP KALIMANTAN TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	80.646.449,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2.	26.649.600,00	52.692.600,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.	-133.248,00	-263.463,00
Persediaan	C.1.4.	1.945.488.173,00	1.452.744.373,00
Jumlah Aset Lancar		2.052.650.974,00	1.505.173.510,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	40.065.676.000,00	10.350.886.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.925.962.065,00	7.314.119.065,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	16.003.268.000,00	11.636.691.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.080.317.000,00	2.653.880.809,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	108.221.298,00	108.221.298,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6.	-6.246.648.214,00	-5.858.154.640,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6.	-521.431.578,00	-2.037.158.468,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6.	-217.442.294,00	-721.180.082,00
Jumlah Aset Tetap		59.197.922.277,00	23.447.304.982,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	11.673.578,00	11.673.578,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	0,00	44.268.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3.	0,00	-44.268.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-10.144.828,00	-8.616.078,00
Jumlah Aset Lainnya		1.528.750,00	3.057.500,00
Jumlah Aset		61.252.102.001,00	24.955.535.992,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	17.541.052,00	21.165.132,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.541.052,00	21.165.132,00
Jumlah Kewajiban		17.541.052,00	21.165.132,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	61.234.560.949,00	24.934.370.860,00
Jumlah Ekuitas		61.234.560.949,00	24.934.370.860,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		61.252.102.001,00	24.955.535.992,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTP KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	222.764.968,00	226.598.558,00
JUMLAH PENDAPATAN		222.764.968,00	226.598.558,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4.287.891.720,00	4.116.585.339,00
Beban Persediaan	D.3.	239.517.000,00	128.534.000,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.900.673.524,00	3.030.274.705,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	327.405.400,00	327.857.100,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.258.176.294,00	2.007.162.400,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	2.976.424.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.146.408.426,00	834.620.666,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	-130.215,00	263.463,00
JUMLAH BEBAN		12.159.942.149,00	13.421.721.673,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-11.937.177.181,00	-13.195.123.115,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	113.789.849,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	1.472.220.261,00	3.953.656.180,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	1.371.180.500,00	3.549.546.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		214.829.610,00	404.110.180,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-11.722.347.571,00	-12.791.012.935,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	24.934.370.860,00	22.331.804.206,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-11.722.347.571,00	-12.791.012.935,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1.	-10.522.000,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2.	0,00	-613.916.961,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4.	36.022.899.971,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	12.010.159.689,00	16.007.496.550,00
EKUITAS AKHIR		61.234.560.949,00	24.934.370.860,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerjabahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur (BPTP Kaltim) mempunyai **tugas** melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
7. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
8. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP Kalimantan Timur.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Kalimantan Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Kalimantan Timur menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Kalimantan Timur yang

merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Kalimantan Timur telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	30.790.000,00	30.790.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	81.360.000,00	81.360.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	19.200.000,00	19.200.000,00
Jumlah Pendapatan	131.350.000,00	131.350.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.463.000.000,00	4.463.000.000,00
Belanja Lembur	52.000.000,00	52.000.000,00
Belanja Barang Operasional	765.155.000,00	516.155.000,00
Belanja Barang Non Operasional	4.913.671.000,00	2.974.938.000,00
Belanja Barang Persediaan	91.895.000,00	94.870.000,00
Belanja Jasa	718.200.000,00	573.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	327.145.000,00	327.145.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.863.840.000,00	2.274.830.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	847.750.000,00	562.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.400.000,00	703.088.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.600.000,00	189.600.000,00
Jumlah Belanja	14.642.656.000,00	12.731.626.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp352.076.078,00 atau mencapai 268,04% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp131.350.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	81.360.000,00	176.618.000,00	217,08
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	9.757.000,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	30.790.000,00	129.974.817,00	422,13
Pendapatan Lain-lain	0,00	5.764.261,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	19.200.000,00	29.962.000,00	156,05
Jumlah	131.350.000,00	352.076.078,00	268,04

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 40,55% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	176.618.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	9.757.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	129.974.817,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	0,00	166.691.000,00	- 100,00
Pendapatan Lain-lain	5.764.261,00	23.893.580,00	-75,88
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	29.962.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	59.907.558,00	- 100,00
Jumlah	352.076.078,00	250.492.138,00	40,55

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp12.281.589.318,00 atau 96,47% dari anggaran belanja sebesar Rp12.731.626.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	4.515.000.000,00	4.292.402.292,00	95,07
Belanja Barang	7.323.938.000,00	7.116.008.298,00	97,16
Belanja Modal	892.688.000,00	875.389.000,00	98,06
Total Belanja Kotor	12.731.626.000,00	12.283.799.590,00	96,48
Pengembalian Belanja		-2.210.272,00	0,00
Total Belanja	12.731.626.000,00	12.281.589.318,00	96,47

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar -24,42% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja modal pada tahun 2018 hanya bersifat pengembangan aset dan penambahan peralatan dan mesin.
2. Pada tahun 2017 terdapat kegiatan revitalisasi kebun percobaan.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	4.290.192.020,00	4.118.614.589,00	4,17
Belanja Barang	7.116.008.298,00	6.379.712.040,00	11,54
Belanja Modal	875.389.000,00	5.750.710.809,00	- 84,78
Total Belanja	12.281.589.318,00	16.249.037.438,00	- 24,42

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.290.192.020,00 dan Rp4.118.614.589,00. Belanja

Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,17% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat kenaikan gaji pokok dan tunjangan pegawai secara berkala.
2. Terdapat penambahan / kenaikan komponen gaji 14 (THR) pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.240.415.292,00	4.094.160.495,00	3,57
Belanja Lembur	51.987.000,00	25.970.000,00	100,18
Jumlah Belanja Kotor	4.292.402.292,00	4.120.130.495,00	4,18
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.210.272,00	-1.515.906,00	45,81
Jumlah Belanja	4.290.192.020,00	4.118.614.589,00	4,17

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.116.008.298,00 dan Rp6.379.712.040,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 11,54% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	484.820.823,00	493.189.655,00	-1,70
Belanja Barang Non Operasional	2.947.124.680,00	2.171.680.100,00	35,71
Belanja Barang Persediaan	94.319.300,00	47.916.000,00	96,84
Belanja Jasa	467.259.801,00	364.161.785,00	28,31
Belanja Pemeliharaan	326.938.400,00	327.006.100,00	-0,02
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.258.176.294,00	2.007.162.400,00	12,51

Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	537.369.000,00	968.596.000,00	-44,52
Jumlah Belanja Kotor	7.116.008.298,00	6.379.712.040,00	11,54
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	7.116.008.298,00	6.379.712.040,00	11,54

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp875.389.000,00 dan Rp5.750.710.809,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar -84,78% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	686.889.000,00	1.110.291.000,00	-38,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.500.000,00	4.444.419.809,00	-95,76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	196.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	875.389.000,00	5.750.710.809,00	-84,78
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	875.389.000,00	5.750.710.809,00	-84,78

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp686.889.000,00 dan Rp1.110.291.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami penurunan sebesar -38,13% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Adanya renovasi ruangan kepala balai.
2. Adanya pembelian kendaraan roda 4 untuk operasional kepala balai.
3. Pembelian peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	686.889.000,00	1.110.291.000,00	-38,13
Jumlah Belanja Kotor	686.889.000,00	1.110.291.000,00	-38,13
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	686.889.000,00	1.110.291.000,00	-38,13

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp188.500.000,00 dan Rp4.444.419.809,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 mengalami penurunan sebesar -95,76% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya renovasi ruangan kerja kepala balai.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.500.000,00	4.444.419.809,00	-95,76
Jumlah Belanja Kotor	188.500.000,00	4.444.419.809,00	-95,76
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	188.500.000,00	4.444.419.809,00	-95,76

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp80.646.449,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Hibah ACIAR	80.646.449,00	0.00
Jumlah	80.646.449,00	0.00

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.649.600,00 dan Rp52.692.600,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Bagus Indarto Setyawan (Biaya Pengiriman Alsin dan Honor KPA an. M. Hidayanto)	0.00	5,764,000.00
2.	Ludy Kartika Kristianto (Tukin)	26.649.600,00	34,257,600.00
3.	Nur Rizqi Bariroh (Tukin)	0,00	5,118,000.00
	M. Rizal (Tukin)	0.00	7,553,000.00
	Jumlah	26.649.600,00	52.692.600,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-133.248,00 dan Rp-263.463,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	26.649.600,00	0.5%	-133.248,00
Kurang Lancar	0.00	10%	0.00
Diragukan	0.00	50%	0.00
Macet	0.00	100%	0.00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.945.488.173,00 dan Rp1.452.744.373,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	52.445.300,00	28.083.000,00
Bahan untuk Pemeliharaan	1.899.500,00	1.513.000,00
Suku Cadang	19.475.873,00	19.475.873,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	875.154.000,00	404.065.000,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	265.902.000,00	252.852.000,00

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	387.959.000,00	334.000.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	98.450.000,00	98.450.000,00
Bahan Baku	244.202.500,00	313.057.500,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	1.248.000,00
Jumlah	1.945.488.173,00	1.452.744.373,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp40.065.676.000,00 dan Rp10.350.886.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	10.350.886.000,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	29.714.790.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	40.065.676.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Mutasi Tambah Aset tetap Tanah adalah berasal dari revaluasi aset.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.925.962.065,00 dan Rp7.314.119.065,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	7.314.119.065,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	684.097.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-72.254.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	7.925.962.065,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-6.246.648.214,00

Nilai Buku per 31 Desember 2018	1.679.313.851,00
--	-------------------------

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.003.268.000,00 dan Rp11.636.691.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	11.636.691.000,00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	171.318.000,00
Pengembangan Nilai Aset	188.500.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	6.198.608.646,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-2.020.531.646,00
Transfer Keluar	-171.318.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	16.003.268.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-521.431.578,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	15.481.836.422,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.080.317.000,00 dan Rp2.653.880.809,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.653.880.809,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	109.501.325,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-683.065.134,00
Saldo per 31 Desember 2018	2.080.317.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-217.442.294,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	1.862.874.706,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp108.221.298,00 dan Rp108.221.298,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-6.985.522.086,00 dan Rp-8.616.493.190,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.925.962.065,00	-6.246.648.214,00	1.679.313.851,00
2.	Gedung dan Bangunan	16.003.268.000,00	-521.431.578,00	15.481.836.422,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.080.317.000,00	-217.442.294,00	1.862.874.706,00
4.	Aset Tetap Lainnya	108.221.298,00	0,00	108.221.298,00
Akumulasi Penyusutan		26.117.768.363,00	-6.985.522.086,00	19.132.246.277,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.673.578,00 dan Rp11.673.578,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	11.673.578,00

Uraian	Nilai
Jumlah	11.673.578,00

C.4.2. ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp44.268.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Kalimantan Timur serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-10.144.828,00 dan Rp-52.884.078,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	11.673.578,00	-10.144.828,00	1.528.750,00
	Akumulasi Penyusutan	11.673.578,00	-10.144.828,00	1.528.750,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17.541.052,00 dan Rp21.165.132,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP Kalimantan Timur per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	2.300.300,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	17.541.052,00	18.864.832,00
Jumlah	17.541.052,00	21.165.132,00

C.6. EKUITAS

C.6. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp61.234.560.949,00 dan Rp24.934.370.860,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp222.764.968,00 dan Rp226.598.558,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	29.704.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	258.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	0,00	166.691.000,00	-100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.275.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	176.618.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0,00	48.499.700,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	6.331.200,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.578.768,00	11.407.858,00	-24,80
Jumlah	222.764.968,00	226.598.558,00	-1,69

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.287.891.720,00 dan Rp4.287.891.720,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	2.905.276.880,00	2.858.411.100,00	1,64
Beban Pembulatan Gaji PNS	41.608,00	40.563,00	2,58
Beban Tunj. Anak PNS	61.073.072,00	56.592.234,00	7,92
Beban Tunj. Beras PNS	150.633.600,00	150.995.700,00	-0,24
Beban Tunj. Fungsional PNS	348.660.000,00	311.180.000,00	12,04
Beban Tunj. PPh PNS	10.331.114,00	7.472.622,00	38,25
Beban Tunj. Struktural PNS	30.240.000,00	8.100.000,00	273,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	202.728.648,00	188.488.120,00	7,56
Beban Tunjangan Umum PNS	91.219.798,00	97.880.000,00	-6,80
Beban Uang Lembur	51.987.000,00	25.970.000,00	100,18
Beban Uang Makan PNS	435.700.000,00	411.455.000,00	5,89
Jumlah	4.287.891.720,00	4.116.585.339,00	4,16

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp239.517.000,00 dan Rp128.534.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	205.955.000,00	17.228.000,00	1.095,47
Beban Persediaan konsumsi	33.562.000,00	111.306.000,00	-69,85
Jumlah	239.517.000,00	128.534.000,00	86,35

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.900.673.524,00 dan Rp3.030.274.705,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.792.000,00	0,00	0,00
Beban Bahan	2.002.602.180,00	1.509.505.200,00	32,67
Beban Barang Non Operasional Lainnya	627.242.500,00	465.199.900,00	34,83
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	128.880.000,00	134.400.000,00	-4,11
Beban Honor Output Kegiatan	317.280.000,00	196.975.000,00	61,08
Beban Jasa Konsultan	22.440.000,00	45.000.000,00	-50,13
Beban Jasa Profesi	153.700.000,00	115.000.000,00	33,65
Beban Keperluan Perkantoran	346.790.823,00	349.691.655,00	-0,83
Beban Langganan Air	8.211.507,00	5.252.920,00	56,32
Beban Langganan Listrik	200.492.156,00	196.564.779,00	2,00
Beban Langganan Telepon	3.592.358,00	3.587.251,00	0,14
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.150.000,00	9.098.000,00	0,57
Beban Sewa	77.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.900.673.524,00	3.030.274.705,00	28,72

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp327.405.400,00 dan Rp327.857.100,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
--------	------------------	------------------	----------------

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119.294.000,00	119.262.000,00	0,03
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123.573.500,00	123.574.100,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.070.900,00	84.170.000,00	-0,12
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	467.000,00	851.000,00	-45,12
Jumlah	327.405.400,00	327.857.100,00	-0,14

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.258.176.294,00 dan Rp2.007.162.400,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.805.256.394,00	1.536.645.400,00	17,48
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	12.100.000,00	-30,58
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	130.750.000,00	143.825.000,00	-9,09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	313.769.900,00	314.592.000,00	-0,26
Jumlah	2.258.176.294,00	2.007.162.400,00	12,51

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.976.424.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	47.800.000,00	-100,00
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	2.928.624.000,00	-100,00
Jumlah	0,00	2.976.424.000,00	-100,00

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.146.408.426,00 dan Rp834.620.666,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	1.528.750,00	1.528.750,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	504.804.756,00	268.945.012,00	87,70
Beban Penyusutan Irigasi	41.462.954,00	15.093.723,00	174,70
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	134.718.566,00	123.035.947,00	9,50
Beban Penyusutan Jaringan	3.145.826,00	3.145.826,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	460.747.574,00	422.871.408,00	8,96
Jumlah	1.146.408.426,00	834.620.666,00	37,36

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-130.215,00 dan Rp263.463,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-130.215,00	263.463,00	-149,42
Jumlah	-130.215,00	263.463,00	-149,42

D.10. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-1.371.180.500,00	-3.549.546.000,00	-61,37
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0,00	52.692.600,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.372.220.000,00	3.563.667.500,00	-61,49
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	100.000.000,00	313.402.500,00	-68,09
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	113.789.849,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	21.502.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.021.580,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	261,00	370.000,00	-99,93
Jumlah	214.829.610,00	404.110.180,00	-46,84

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.934.370.860,00 dan Rp22.331.804.206,00.

E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-11.722.347.571,00 dan Rp-12.791.012.935,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp36.012.377.971,00 dan Rp-613.916.961,00.

E.4.1. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-10.522.000,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2018.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-10.522.000,00
Jumlah	-10.522.000,00

E.4.2. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-613.916.961,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.3. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.4. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp36.022.899.971,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	29.714.790.000,00
Gedung dan Bangunan	4.178.077.000,00
Jalan dan Jembatan	-688.857.809,00
Irigasi	115.294.000,00
Jumlah	36.022.899.971,00

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.010.159.689,00 dan Rp16.007.496.550,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.193.119.318,00
Diterima dari Entitas Lain	-352.076.078,00
Transfer Keluar	-169.604.820,00
Transfer Masuk	169.604.820,00
Pengesahan Hibah Langsung	169.116.449,00
Jumlah	12.010.159.689,00

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-352.076.078,00 sedangkan DKEL sebesar Rp12.193.119.318,00.

E.5.2. TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp169.604.820,00 yang terdiri dari:

1. Gedung dan Bangunan yang berasal dari entitas sub satker BPTP Kaltim masuk ke sub satker KP Lempake senilai Rp171.318.000,00.
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang berasal dari entitas sub satker BPTP Kaltim masuk ke sub satker KP Lempake senilai –Rp1.713.180,00.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp169.604.820,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Gedung dan Bangunan	Sub Satker BPTP Kaltim	171.318.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Sub Satker BPTP Kaltim	-1.713.180,00
Jumlah			169.604.820,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-169.604.820,00 yang terdiri dari:

1. Gedung dan Bangunan yang keluar dari entitas sub satker BPTP Kaltim ke KP Lempake senilai Rp171.318.000,00.
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang keluar dari entitas sub satker BPTP Kaltim ke KP Lempake senilai –Rp1.713.180,00.

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Gedung dan Bangunan	Sub Satker KP Lempake	-171.318.000,00

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Sub Satker KP Lempake	1.713.180,00
Jumlah			169.604.820,00

E.5.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp169.116.449,00 dari total Rp169.116.449,00 yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00.

No	Pem pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	ACIAR	Uang	169.116.449,00
169.116.449,00			

E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp61.234.560.949,00 dan Rp24.934.370.860,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur dengan kode Satker 018.09.567627.KD mengelola anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018, menerima alokasi anggaran sebesar Rp.12.731.626.000,00,- dan mengalami revisi DIPA sebanyak 8 (Delapan) kali.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/KP.230/8/2017, tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Pelaksanaan (Eselon V) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Pada BPTP Kalimantan Timur terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang semula menjabat adalah Dr. Ir. Muhamad Hidayanto, MP digantikan oleh Dr. Muhammad Amin, S.Pi., M.Si.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim Nomor 05/Kpts/KU.010/H.12.25/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 telah menetapkan Bachrian Pebriyadi, S.Pi, M.Si selaku Pejabat Penandatanganan SPM. Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim Nomor 04/Kpts/KU.010/H.12.25/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 telah ditetapkan Bagus Indarto Setyawan A.Md sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPTP Kaltim.

Pengelola keuangan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan sebagai berikut :

1. Dr. Muhammad Amin, S.Pi., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Parna selaku Bendahara Pengeluaran
3. Alpihendri selaku Bendahara Penerimaan

Berdasarkan rekening koran bank, terdapat saldo senilai Rp80.931.392,00 pada rekening Giro BRI dengan nomor rekening 8201003839309 yang berasal dari kegiatan Hibah ACIAR senilai Rp80.646.449,00 ditambah bunga jasa giro dan pajak.

Pada Persediaan terdapat belanja 526 (kegiatan TTP) yang belum diserahkan kepada masyarakat senilai Rp1.090.096.000,00 dikarenakan masih dalam proses pengajuan ke Litbang setelah pemda setempat menandatangani naskah hibah berupa surat pernyataan Pemda Kukar bersedia menerima hibah TTP dalam hal ini yang menandatangani adalah Plt. Bupati serta Panitia Hibah telah dibentuk.

PROFIL SATKER

Data Umum

- a. Nama Satker : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Kalimantan Timur
- b. Alamat : Jl. Pangeran M Noor, Sempaja
- c. Kota : Samarinda
- d. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dr. Muhammad Amin, S.Pi, M.Si
- e. Pejabat Pembuat Komitmen : Bagus Indarto Setyawan, A.Md
- f. Pejabat Pengadaan : Herianto Padang
- g. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Yohanis Pargo Paito
- h. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPSPM) : Bachrian Pebriadi, S.Pi, M.Si
- i. Bendahara Pengeluaran : Parna
- j. Bendahara Penerima : Alpi Hendri
- k. Anggaran RKA-KL TA2018 : Rp12.731.626.000,00
- l. Nomor DIPA/RKA-KL : SP DIPA-018.09.2.567627/2018